

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara negara yang memiliki banyak sekali wisata dan budaya yang menarik dan indah. Berbagai macam wisata yang begitu unik dan indah merupakan salah satu dari banyaknya ciri khas wisata-wisata yang dimiliki oleh setiap daerah sendiri. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah serta indah dan keberagaman budaya Masyarakat yang menarik di Indonesia merupakan daya tarik wisatawan lokal dan mancanegara di seluruh dunia.

Perkembangan wisata di Indonesia saat ini begitu pesat disetiap daerahnya, menjadikan sektor wisata di Indonesia sebagai unggulan dalam perekonomian negara. Perkembangan pariwisata memberikan banyak pemasukan ekonomi untuk setiap daerahnya yang sadar akan potensi pariwisata yang dapat digunakan sebagai tempat wisata. Adanya otonomi daerah membuat setiap masing daerah berusaha untuk untuk mengembangkan potensi wisata didaerahnya sehingga dapat dikunjungi wisatawan.

Dunia pariwisata mulai dikenal oleh masyarakat sebagai peluang baru di sektor ekonomi bisnis dan juga perdagangan. Industri pariwisata mempunyai daya tarik yang besar bagi pengelola wisata karena mendatangkan keuntungan pula yang besar bagi setiap daerah yang mengembang wisatanya. Hal tersebut sangat bermanfaat untuk perkembangan ekonomi di negara dan juga dapat membantu

menaikkan tingkat kesejahteraan hidup rakyat. Pengelolaan kegiatan pariwisata secara umum berdasar pada karakteristik, kekhasan serta daya tarik wisata alam yang indah dan budaya yang menarik dimiliki pariwisata tersebut. Oleh sebab itu, untuk menjaga kelangsungan kegiatan pariwisata dan budaya yang perlu dijaga perlu adanya pengelolaan serta pengembangan yang baik pada potensi pariwisata yang baik tersebut. Pengelolaan potensi pariwisata yang baik ini memiliki bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tempat pariwisata yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian bagi masyarakat.¹

Usaha mengembangkan potensi dunia pariwisata di Indonesia ini didukung UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menyebutkan keberadaan tempat pariwisata pada suatu daerah akan sangat menguntungkan bagi Masyarakat maupun daerahnya, antara lain meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan perkeekonomian hidup masyarakat, dan memperluas kesempatan lapangan kerja mengingat banyaknya pengangguran saat ini, meningkatkan rasa cinta lingkungan serta melestarikan alam yang indah dan budaya yang menarik setempat. Pengembangan suatu tempat pariwisata yang dilakukan dengan baik akan memperoleh pendapatan ekonomi yang baik juga untuk Masyarakat-masyarakat setempat atau pun komunitas setempat.²

Sesuai dengan sasaran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjanjikan

¹ Suhendroyono, Rizki Novitasari, *Pengelolaan Wisata Alam Watu Payung sebagai Ikon Wisata Berbasis Budaya di Gunung Kidul Yogyakarta*, Jurnal Kepariwisata, 2016, Hlm 43.

² Selly Ardianti, *Pengaruh Kunjungan Wisata terhadap Pendapatan Masyarakat di Desa Madewi, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2015*, Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha, Vol. 09, No.1, 2017, Hlm 199.

dan memberi harapan yang tinggi bagi pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang dimaksud adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi bagi daerah ataupun negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat disekitar tempat pariwisata, meningkatkan sumber daya manusia yang baik, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran dengan penyediaan lapangan pekerja oleh pariwisata, melestarikan alam yang indah, lingkungan yang baik, serta sumber daya alam yang harus dijaga, dalam menjaga kebudayaan menarik, yang mengangkat gambaran bangsa serta mempererat persahabatan antar bangsa. Perkembangan wisata pada saat ini menimbulkan perbincangan yang dianggap kurang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Selain itu, ada beberapa faktor penghambat yang lain diantaranya kurang keterampilan, kurangnya wawasan, pengetahuan dan kebijakan terutama di negara-negara berkembang. Pengelolaan pariwisata yang baik harus memberikan keuntungan kesejahteraan ekonomi, sosial dan budaya kepada masyarakat di sekitar destinasi.

Pada tahun 2019 Indonesia mengalami permasalahan terhadap sektor ekonomi dari sektor pariwisata, hal ini dikarenakan oleh terjadinya pandemi COVID-19, seperti yang kita ketahui, kenaikan kasus penyebaran virus yang tinggi menyebabkan pergantian aturan serta berkurangnya kegiatan-kegiatan diluar rumah maupun di tempat umum, tentunya hal ini berpengaruh besar kepada sektor pariwisata³. Sebelum pandemi COVID 19, industri pariwisata merupakan sektor yang berkembang dengan baik yang tidak hanya berkontribusi pada peningkatan

³ Asmita Azis, 2022 : *Strategi Pemasaran Pariwisata Masa Pandemi Di Kota Makassar*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, Hlm 1

ekonomi tetapi juga menciptakan peluang lapangan kerja untuk masyarakat. Akan tetapi nyatanya, pada masa saat pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia membuat sektor yang paling terasa dampaknya secara ekonomi⁴.

Pandemi COVID 19 atau virus corona telah mengalihkan kondisi kenormalan di semua sektor kehidupan dan lain juga pada kegiatan sektor wisata di desa tanjung lanjut Muara Jambi tepatnya di wisata Danau Tangkas. Objek pariwisata danau tangkas ialah salah satu objek wisata yang ada di muara jambi yang dibuat pada tahun 2017 dengan luas 404 Ha yang berkonsep wisata alam. Pemerintah Negara Indonesia memberikan perhatian serius pada pengembangan desa yang adil melalui Kebijakan Dana Desa yang mana, hampir semua tingkatan masyarakat pedesaan diarahkan untuk mengenalkan pariwisata dengan mengembangkan rencana yang baik dan desain yang unik dan menarik sesuai dengan keunggulan masing-masing daerah. Pengembangan dan peningkatan masyarakat berkelanjutan yang sukses adalah indikator keberhasilan dalam pembangunan pedesaan. Kunci menuju masyarakat berkelanjutan yang sukses membutuhkan adanya komunitas yang peduli terhadap pariwisata di setiap tahap proses Pembangunan. Dalam konteks pengembangan wisata berbasis masyarakat, keterlibatan masyarakat adalah pusat utama dalam pengembangan serta pengelolaan pariwisata. Karena dengan adanya musibah pandemi ini banyak dampak buruk yang ditimbulkan. Sehingga instrumen kebijakan yang mengakselerasi proses pemulihan pembangunan mutlak diperlukan adanya.

⁴ *Ibid* 7

Wisata Danau Tangkas adalah salah satu objek wisata yang dikembangkan pada tahun 2017 di Desa Tanjung Lanjut Muara Jambi, namun pada 2017 objek wisata mengalami permasalahan pandemic covid 19. Hal ini dibuktikan dengan penurunan jumlah wisatawan pada tahun 2019 yang mana pada saat itu terjadi covid 19. Sehingga objek wisata yang ada di Muara Jambi yaitu Danau Tangkas tidak jauh berbeda dengan objek-objek pariwisata lainnya yang sangat mengalami kerugian akibat adanya pandemi Covid-19 ini.⁵

Wisata Danau Tangkas yang dibuat pada tahun 2017 di Desa Tanjung Lanjut Muara Jambi memiliki keuntungan yaitu diperbolehkannya dibuka pada masa Covid-19 sehingga pada tahun 2021 wisata danau tangkas Desa Tanjung Lanjut ini memiliki pengunjung yang banyak yaitu 15.333 pengunjung dikarenakan banyaknya wisata-wisata di Provinsi Jambi ditutup sehingga pengunjung membelundak, akan tetapi permasalahannya terjadi pada tahun setelahnya yaitu pada tahun 2022 pengunjung turun dratis yaitu 12.248 pengunjung pada saat covid-19 dinyatakan aman di Provinsi Jambi sehingga pengelolaan yang harus dilakukan oleh Wisata Danau Tangkas harus dievaluasi kembali dengan tujuan dapat bersaing dengan wisata-wisata lain yang ada disekitar Objek Wisata Danau Tangkas Muara Jambi.

Selain dibutuhkannya pengelolaan yang baik oleh pengelola objek wisata danau tangkas Desa Tanjung Lanjut Kabupaten Muara Jambi, dibutuhkannya perencanaan yang baik, penyusunan program yang menarik sehingga dapat menarik

⁵ *Ibid* 9

pengunjung, dan pengembangan pengelolaan destinasi wisata danau tangkas serta industri wisata dan kerjasama bersama pihak-pihak lain yang dibutuhkan untuk membantu pengembangan pengelolaan objek wisata danau tangkas

Adapun penelitian terdahulu sebagai pembanding penelitian penulis yang di buat oleh Asmita Asiz pada tahun 2022 yang berasal dari mahasiswa Fakultas ilmu sosial dan ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makasar dengan judul STRATEGI PEMASARAN PARIWISATA MASA PANDEMI DI KOTA MAKASSAR⁶. Jenis penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif Tehnik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara/Interview, studi dokumen, observasi dan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rencana strategis yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar dalam memasarkan pariwisata Kota Makassar pada masa pandemi dapat meningkatkan kunjungan wisatawan yang datang ke Kota Makassar. Adapun kekurangan dari penelitian tersebut yaitu tidak merincikan anggaran yang diberikan secara khusus oleh pemerintah kepada Pemerintah Kota Makasar dalam pengembangan pemasaran pariwisata di Kota Makasar.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Zakaris Maurits Wader pada tahun 2021 yang berasal dari mahasiswa Fakultas Pariwisata Universitas Katolik De La Salle Manado dengan judul Strategi pemilihan potensi wisata pantai tanjung lampu kampong wailebet di Kabupaten Raja Ampat Pasca Pandemi Covid-19

⁶ Asmita Azis, 2022 : *Strategi Pemasaran Pariwisata Masa Pandemi Di Kota Makasar*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makasar.

dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.⁷ Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa daerah Kampung Wailebet khususnya Pantai Tanjung Lampu memiliki potensi pariwisata yang masih alami dan belum tersentuh oleh pihak luar khususnya potensi wisata bahari. Pemerintah sendiri sudah mengeluarkan aturan mengenai kebiasaan normal hidup baru atau pasca covid-19 namun belum secara aktif memperhatikan potensi wisata Pantai Tanjung Lampu. Untuk masyarakat lokal juga selama ini belum mengimplementasikan kebiasaan hidup baru namun sudah mulai sadar wisata. Adapun kekurangan dari penelitian ini yaitu tidak menjelaskannya faktor pendukung serta faktor penghambat pemerintah daerah dalam menangani pariwisata pasca covid 19 di Kabupaten Raja Ampat.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Riza Muhamad Fadhil dan Muchamad Zaenuri yang berjudul Strategi Recovery Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Pada Masa New Normal dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif⁸. Hasil penelitian ini membahas strategi Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta yang telah banyak mengupayakan untuk mendatangkan wisatawan agar masyarakat yang mengandalkan penghidupan dari pariwisata bisa terus bertahan, yang salah satu upayanya yaitu bekerjasama dengan banyak stakeholder untuk menekan kasus Covid-19, menyalurkan dana hibah pariwisata untuk kepentingan pariwisata dan menyelenggarakan event secara virtual dll. Diharapkan

⁷ Zakarias Maurits Wader, 2021 : *Strategi pemilihan potensi wisata pantai tanjung lampu kampong wailebet di Kabupaten Raja Ampat Pasca Pandemi Covid-19*, Fakultas Pariwisata Universitas Katolik De La Salle Manado.

⁸ Riza Muhammad Fadhil, Muchamad Zaenuri, 2021 : *Strategi Recovery Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Pada Masa New Normal*, Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan, Vol. 2 No 2

dengan strategi yang dilakukan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dapat mencapai target sesuai dengan tujuan. Saran pada penelitian ini diharapkan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta melengkapi kekurangan yang ada dari evaluasi yang dilakukan sehingga strategi yang diterapkan dapat sepenuhnya terlaksana. Selain itu, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dapat lebih berkoordinasi dengan dinas pariwisata kota lain untuk lebih mengetahui inovasi-inovasi yang dilakukan serta dinas dapat membuka kontak layanan keluhan, kritik dan saran secara online Adapun kekurangan dari penelitian ini tidak menjelaskan bagaimana proses pemerintah Kota Yogyakarta dalam memulihkan pariwisata di Kota Yogyakarta.

Lalu penelitian yang dilakukan oleh Gilang Prabandaru, dengan judul Pemulihan Desa Wisata Blue Lagoon Setelah Penerapan Kenormalan Baru Berdasarkan Konsep Sinergitas Penta Helix dengan menggunakan metode deskriptif Kualitatif⁹ Hasil penelitian ini membahas ditemukan bahwa Desa Wisata Blue Lagoon memiliki hubungan kerja sama terbesar dengan pemerintah sebagai pemberi dana pembangunan dan masyarakat lokal selaku aktor utama yang memiliki satu tokoh kunci yaitu Suhadi. Pada pelaksanaan pemulihan, pelaku bisnis dan media informasi yang berasal dari masyarakat hanya mengikuti arahan dari ketua pokdarwis. Akademisi merupakan aktor yang mempunyai hubungan kurang baik dengan masyarakat lokal karena pernah dikecewakan dan ditakutkan akan mengubah rancangan pembangunan. Hal tersebut menyebabkan belum terciptanya sinergitas antar aktor dalam konsep Penta Helix. Adapun

⁹ Gilang Prabandaru, 2021 : *Pemulihan Desa Wisata Blue Lagoon Setelah Penerapan Kenormalan Baru Berdasarkan Konsep Sinergitas Penta Helix*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.

kekurangan dari penelitian ini adalah tidak menjelaskan sumber daya apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Pitoy Veibyolla Nicolin, dengan judul Strategi Pemulihan Objek Wisata Raewaya Hills Di Kabupaten Minahasa Utara Selama Pandemi Covid-19 dengan menggunakan metode deskriptif Kualitatif¹⁰ Hasil penelitian ini bahwa pihak pengelola telah menyediakan fasilitas dan atraksi wisata bagi wisatawan yang datang berkunjung dan akan berupaya untuk memulihkan kembali objek wisata ini. Wisatawan secara umum menyatakan fasilitas yang ada sudah baik, namun berharap agar dilakukan pelebaran terhadap jalan dan membuka kembali kafe dan wahana permainan. Adapun kekurangan dari penelitian ini adalah tidak menjelaskan bagaimana sikap pemerintah atau sikap actor pemangku kebijakan dalam mengelola pemulihan Wisata Raewaya Hills Di Kabupaten Minahasa Utara.

Berdasarkan alasan dan judul penelitian diatas serta beberapa permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam pengangkatan permasalahan mengenai strategi pemulihan pariwisata di danau tangkas setelah covid-19 di Muara Jambi dengan judul **“ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN OBJEK WISATA DANAU TANGKAS MUARA JAMBI PASCA PEMULIHAN COVID 19”**.

¹⁰ Pitoy Veibyolla Nicolin, 2021 : *Strategi Pemulihan Objek Wisata Raewaya Hills Di Kabupaten Minahasa Utara Selama Pandemi Covid-19*, Fakultas Pariwisata, Universitas Katolik De La Salle Manado.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan objek wisata danau tangkas oleh Pemerintah Desa Tanjung Lanjut Muara Jambi pasca covid 19 ?
2. Apa saja tantangan dalam pengelolaan wisata danau tangkas tersebut oleh Pemerintah Desa Tanjung Lanjut Muaro Jambi pasca covid 19 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengelolaan objek wisata danau tangkas oleh Pemerintah Desa Tanjung Lanjut Muara Jambi pasca covid 19.
2. Untuk mengetahui tantangan dalam pengelolaan wisata danau tangkas tersebut oleh Pemerintah Desa Tanjung Lanjut Muaro Jambi pasca covid 19.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan serta pengembangan khazanah keilmuan khususnya Ilmu Pemerintahan serta menjadikan rujukan bagi peneliti berikutnya yang membahas permasalahan yang sama.

b. Secara Praktis

Temuan penelitian ini dapat bermanfaat antara lain :

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa Tanjung Lanjut dalam pemulihan wisata Danau Tangkas . Serta sebagai saran untuk menambah wawasan bagi penulis dalam rangka mengembangkan keilmuan yang telah didapat selama dibangku perkuliahan.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Otonomi Daerah

Otonomi Daerah dalam pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 klasifikasi urusan pemerintah terdiri dari tiga urusan yaitu urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren, dan urusan pemerintah umum¹¹.

1. Urusan pemerintah absolut adalah urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
2. Urusan pemerintah konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
3. Urusan pemerintah umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dibagi menjadi

¹¹ Nadela Pratiwi, Pekanbaru : *Analisis Pengelolaan Objek Wisata Puncak Cemara Kota Sawahluto*, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Hlm 51

urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Pemerintahan daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi disebut daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah yang dalam undang-undang ini dikenal adanya daerah tingkat I dan tingkat II.

Penerapan otonomi daerah juga dimaksud sebagai upaya mewujudkan terciptanya pusat - pusat kota baru yang bersifat metropolitan, cosmopolitan, sebagai sentra - sentra perdagangan, bisnis dan industry. Inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya kekuasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas, peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan pemerintah

tersebut bertujuan untuk menyelenggarakan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan alenia ke IV yaitu: "*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial*". Berdasarkan tujuan tersebut, maka dalam Undang – Undang Dasar 1945 pasal 18A, dibentuklah hubungan pemerintahan pusat dan daerah yang meliputi:

1. Wewenang
2. Keuangan
3. Pelayanan Umum
4. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lainnya.

1.5.2 Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.

Berdasarkan hak tersebut, pemerintah memberikan kebebasan kepada Desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Selain itu, pemerintah Desa juga diberikan pendelegasian dan penugasan dari pemerintah daerah ataupun pemerintah untuk mengatur urusan pemerintah tertentu. Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, yang mana dapat menentukan susunan pemerintahan,

mengurus dan mengatur rumah tangga serta memiliki asset dan kekayaan, keberadaan Desa perlu ditegaskan untuk kesejahteraan Masyarakat desa.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, desa memerlukan strategi agar alokasi, potensi dan sumber daya yang ada di desa dapat diefektifkan untuk mendukung Pembangunan desa. Dimana Pembangunan desa diperuntukan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat desa.

Menurut Robert Dalam Surandajang, Dalam rangka mendorong pembangunan di tingkat desa, pemerintah memberikan hak kepada pemerintah desa untuk mengelola wilayahnya sendiri, termasuk melalui lembaga ekonomi tingkat desa, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Salah satu inisiatif yang dikelola Desa untuk meningkatkan pendapatan awal adalah lembaga ini dengan fokus pada ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Kemampuan masyarakat untuk sepenuhnya mengendalikan masalah rumah tangganya sendiri dikenal sebagai kewenangan desa. Sebagai badan koordinasi pemerintahan desa, pemerintah desa menjalankan kewenangan ini. Kewenangan desa meliputi :

1. Pemberdayaan Desa
2. Pembidanaan Masyarakat Desa
3. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
4. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Desa memiliki hak atas sumber-sumber pendapatan karena merupakan daerah otonom. Pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah

kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, merupakan sumber pendapatan desa. Tentu saja, asas-asas kepentingan umum, fungsionalitas, kejelasan hukum, transparansi, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomis harus diikuti dalam pengelolaan aset milik desa. Hal ini ditunjukkan untuk membantu pengelolaannya.

1.5.3 Pengelolaan Pariwisata

Soewarno mengemukakan bahwa manajemen adalah keterampilan mengendalikan atau mengarahkan berbagai sumber daya untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi dinas pariwisata pemuda dan olahraga yang terdiri dari perencanaan, penyusunan program, pengembangan pengelolaan destinasi, dan industri wisata¹².

1. Perencanaan

Perencanaan sesuatu berarti memperhitungkannya untuk mengakomodasi permintaan di masa depan. Merencanakan dan mengelola industri pariwisata adalah cara untuk memastikan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Oleh karena itu, perencanaan harus mempertimbangkan tren pertumbuhan populasi, cadangan pasokan lahan, pertumbuhan utilitas, dan kemajuan teknis dalam penerapannya.

¹² *Ibid.*

Selain itu, standar sumber daya untuk pengelolaan pariwisata juga penting karena mengelola pariwisata membutuhkan pengetahuan dan pengalaman. Perencanaan pengelolaan pariwisata harus mempertimbangkan segala sesuatu yang dapat membantu rencana perjalanan calon wisatawan. Faktor-faktor ini terdiri dari:

a. Saran Prasarana dan Fasilitas

Infrastruktur dan fasilitas apa yang akan ditawarkan kepada calon wisatawan untuk mendukung kegiatan perjalanan mereka harus diperhitungkan dalam industri pariwisata. Pemerintah Daerah juga melakukan pengembangan sarana dan prasarana dengan cara :

- 1) Membangun infrastruktur dan fasilitas umum khusus untuk industri pariwisata untuk membantu pertumbuhan area percontohan pariwisata dengan menawarkan fasilitas permainan, fasilitas air bersih, listrik, drainase, dan telekomunikasi.
- 2) Untuk memenuhi permintaan pengunjung dan memberikan kenyamanan saat berwisata, tingkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur publik, infrastruktur transportasi, dan fasilitas pariwisata. Hal ini akan meningkatkan daya saing zona pengembangan pariwisata.

b. Perencanaan Daya Tarik Wisata

Daya tarik wisata adalah sesuatu yang menarik wisatawan karena keunikan, nilai, dan keragaman sumber daya alam, budaya, dan barang buatan manusia. Destinasi pariwisata tidak diragukan lagi membutuhkan daya tarik untuk menarik pengunjung, mendorong mereka untuk tinggal lebih lama, dan meningkatkan jumlah kunjungan secara keseluruhan. Mendorong dan meningkatkan lalu lintas pengunjung.

2. Penyusunan Program

Mengembangkan akuntabilitas kinerja organisasi adalah tujuan dari perencanaan program. Menyadari bahwa persiapan program merupakan langkah penting dalam mencapai tujuan perencanaan kebijakan juga penting. Pekerjaan penyusunan program meliputi pengumpulan informasi, penyusunan dan pembuatan rencana program, anggaran instansi, dan laporan. Beberapa uraian tugas untuk pengembangan program, diantaranya :

- a. Sebagai kerangka kerja pelaksanaan kegiatan, program kerja kegiatan direncanakan setiap tahun berdasarkan target-target prioritas yang harus dipenuhi.
- b. Menciptakan sumber daya untuk mengkoordinasikan pembuatan anggaran, rencana program, dan kegiatan.
- c. Mempersiapkan penyusunan program dan anggaran.
- d. memberikan pengarahan, mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas dan rencana program.

3. Pengembangan Pengelolaan Destinasi

Dengan melakukan modifikasi dan koreksi berdasarkan hasil pemantauan, pengembangan dan pengelolaan merupakan proses yang dinamis dan berkelanjutan yang mengarah pada pengembangan yang lebih baik. Untuk mencapai keseimbangan dan keselarasan antara pembangunan pariwisata dan pembangunan berwawasan lingkungan, maka tidak mungkin memisahkan upaya pariwisata dengan pembangunan berwawasan lingkungan. Hal ini dikarenakan pembangunan kepariwisataan tidak boleh mengakibatkan perkembangan objek dan daya tarik

wisata, usaha pariwisata, atau keadaan masyarakat menjadi tidak selaras dengan keadaan lingkungan hidup. Pembangunan pengembangan pengelolaannya terdiri dari :

- a. Kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme
 - b. Kegiatan pengembangan Kawasan wisata
4. Industri Wisata

Sektor pariwisata terdiri dari berbagai macam bisnis yang bekerja sama untuk menciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan wisatawan. Bisnis pariwisata adalah kumpulan perusahaan publik dan swasta yang terlibat dalam perancangan, pembuatan, dan promosi barang jasa yang memenuhi kebutuhan wisatawan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 industri wisata adalah sekelompok perusahaan terkait pariwisata yang saling terhubung dan bekerja sama untuk menciptakan produk dan/atau layanan yang memenuhi kebutuhan pengunjung dalam rangka mengimplementasikan pariwisata. adapun berbagai macam aspek-aspek yang tercakup dalam industry pariwisata, antara lain :

- a. Restoran.
- b. Penginapan.
- c. Pelayanan perjalanan.
- d. Transportasi.
- e. Fasilitas rekreasi.
- f. Atraksi wisata.

Sistem manajemen pemasaran objek wisata juga menunjukkan keberhasilan pengembangan. Pemasaran adalah strategi yang melibatkan banyak pihak dan tidak

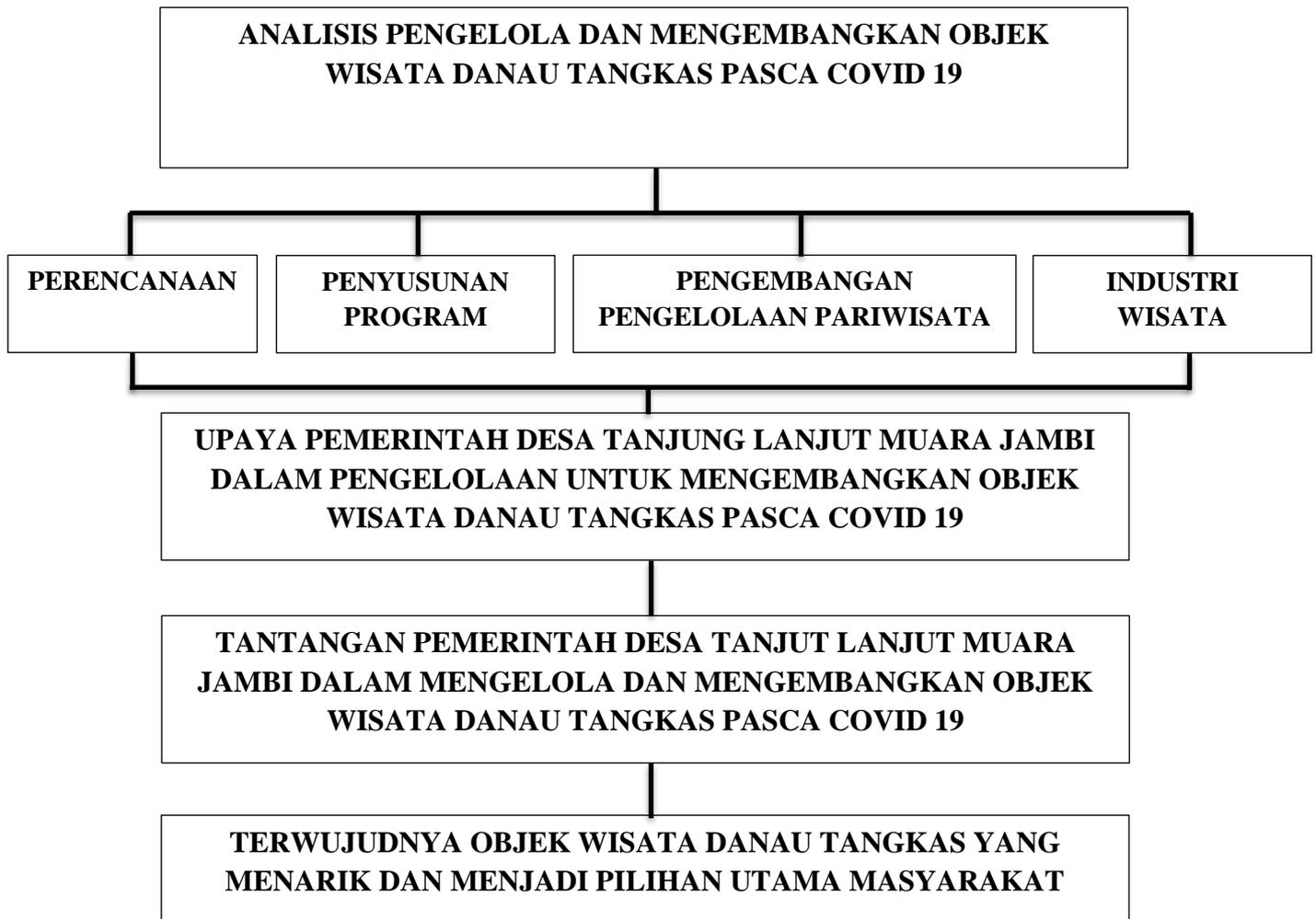
hanya mengandalkan pemasaran, tetapi juga pada sistem wisata yang mempunyai empat fungsi :

- a. Perumusan, pasar baik yang nyata maupun yang potensial dan penyajian yang serius dalam pemasaran.
- b. Komunikasi, memikat permintaan dengan cara menyakinkan wisatawan, dengan menyediakan daya tarik yang ada.
- c. Pengembangan, merencanakan dan mengembangkan antraksi dan jasa wisata yang memenuhi kebutuhan Masyarakat.
- d. Pengawasan, mengevaluasi mengukur dan menghitung berbagai metode penelitian dengan kegiatan promosi, pemanfaatan fasilitas dan anggaran.

Menurut Cox dalam Dowling dan Fanel bahwa pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut :

- a. Pembangunan dan perkembangan pariwisata harus dibangun di atas kearifan lokal dan kepekaan lokal yang mencerminkan keunikan lingkungan dan warisan budaya keunikan lingkungan dan warisan budaya,
- b. Pelestarian, peningkatan, dan perlindungan kualitas sumber daya yang menjadi fondasi pertumbuhan pariwisata. fondasi pertumbuhan kawasan pariwisata.
- c. Pengembangan atraksi wisata baru yang berbasis keaslian budaya daerah adat istiadat daerah.
- d. Pelayanan yang diberikan kepada pengunjung berdasarkan keunikan lingkungan dan budaya setempat.

1.6 Kerangka Pikir



1.7 Metode Penelitian

serangkaian prosedur, berupa cara yang digunakan peneliti untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini, sehingga dalam berkelanjutannya menjadi satu kesatuan yang utuh dan konsisten antara metode yang digunakan dengan teknik operasional dalam pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

1.7.1 Metode Penelitian

Purposive sampling adalah jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif, penulis berusaha untuk terlibat dalam skenario atau fenomena yang menjadi titik fokus penelitian untuk memahami makna dari peristiwa atau kejadian¹³. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry (penyelidikan) yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena yang kemudian disajikan secara naratif¹⁴.

Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia yang terkadang berdasarkan perspektif peneliti itu sendiri dengan tujuan memahami objek secara mendalam¹⁵. Penelitian kualitatif juga menekankan pada analisis proses dengan cara berpikir induktif yang berkaitan dengan fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika

¹³ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 2014), hlm. 328

¹⁴ Ibid. Muri Yusuf, Hlm. 329.

¹⁵ Imam Gunawan, 2015. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori & Praktik*, PT Bumi Aksara Jakarta. Hlm. 80.

ilmiah¹⁶. Menurut Sugiyono dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, tentatif (belum pasti/ berubah) dan berkembang atau berganti setelah peneliti berada dilapangan.¹⁷

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Tanjung Lanjut, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

1.7.3 Fokus Penelitian

Masalah fenomena yang hendak diteliti harus sudah ditetapkan sejak awal meskipun kemungkinan terjadinya perubahan disebabkan faktor riil di lapangan. Masalah yang hendak diteliti kemudian perlu dipersempit, hal itu guna menentukan fokus penelitian¹⁸. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif peneliti memfokuskan penelitian ini terhadap pengelolaan objek wisata danau tangkas desa tanjung lanjut pasca covid 19.

1.7.4 Sumber Data

Secara umum terdapat dua kategori yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer biasanya menggunakan instrumen penelitian yang biasa meliputi : pedoman observasi, pedoman wawancara dan pedoman pertanyaan (kuesioner)¹⁹. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd, *op.cit.*, hlm. 367.

¹⁹ Pahrudin HM, dkk., *Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi*, (Universitas Jambi : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2017), hlm. 15

yang sudah ada. Data ini dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, dokumen atau data-data lain termasuk hasil penelitian yang pernah ada.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tersebut berdasarkan pada sampel yang dipilih adalah mereka yang memiliki informasi yang lebih luas atau kaya (*rich information*). Teknik ini akan mengambil informan yang dianggap paling mengetahui dan memahami pengelolaan objek wisata danau tangkas Desa Tanjung Lanjut Kabupaten Muaro Jambi, Kepala Desa Tanjung Lanjut Muaro Jambi dan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Muaro Jambi.

- a). Bapak Edi Sugito, selaku Kepala Desa Tanjung Lanjut Kabupaten Muaro Jambi
- b). Ibu Saadah, S.E., M.AP, Selaku Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Muaro Jambi

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan tanpa observasi karena fenomena telah lewat, diantaranya :

a. Wawancara

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*Interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*Interviewer*) dan sumber informasi atau yang diwawancarai (*Interviewee*) melalui komunikasi

langsung²⁰. Menurut Kartono wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu ; ini merupakan proses tanya jawab lisan, yaitu dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik .²¹

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan masih berhubungan dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna bagi penelitian kualitatif²². Menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang²³. Salah satu dokumen yang akan digunakan adalah dengan menggunakan penelitian atau karya ilmiah yang masih terkait dengan penelitian ini.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain .²⁴

²⁰ A. Muri Yusuf, *op.cit.*, hlm. 372.

²¹ Imam Gunawan, *op.cit.*, hlm. 160.

²² A. Muri Yusuf, *op.cit.*, hlm. 391.

²³ Imam Gunawan, *op.cit.*, hlm. 176.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta,cv, 2015), 189.

Sementara itu penjabaran lain, analisis data pada hakikatnya adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda dan melakukan kategorisasi sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab²⁵. Penelitian ini menggunakan tahap analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu reduksi data (*data reduction*), paparan data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*)²⁶.

1.7.8 Keabsahan Data

Menurut Mantja triangulasi dapat digunakan untuk memantapkan konsistensi metode silang, seperti wawancara dan dokumentasi atau penggunaan metode yang sama, seperti wawancara dengan beberapa informan²⁷. Variabel triangulasi yang peneliti gunakan adalah berdasarkan perolehan data wawancara dari unsur Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Muaro Jambi dan Kepala Desa Tanjung Lanjut Kabupaten Muaro Jambi. Triangulasi penulis gunakan dalam rangka memaksimalkan objektivitas penelitian.

²⁵ Imam Gunawan, *op.cit.*, hlm. 209.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 210-211.

²⁷ Imam Gunawan, *op.cit.*, hlm. 217-218.

